

 Naskah Kebijakan:

# Optimalisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) Kota Bogor

# 1. Pendahuluan:

## Urgensi Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan

Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan merupakan isu krusial yang secara fundamental mengancam tercapainya tujuan pendidikan nasional untuk menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Alih-alih menjadi ruang aman untuk bertumbuh, lingkungan sekolah dapat berubah menjadi arena yang menimbulkan trauma fisik dan psikologis mendalam bagi peserta didik. Data terkini di Kota Bogor menunjukkan tren yang mendesak untuk ditangani secara serius. Laporan kasus yang masuk ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) menunjukkan peningkatan mengkhawatirkan sebesar 74% dari 31 kasus pada tahun 2023 menjadi 54 kasus pada tahun 2025 (data berjalan per November 2025). Tren serupa tercatat oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), di mana jumlah kasus melonjak lebih dari dua kali lipat dari 7 menjadi 17 pada periode yang sama. Angka-angka ini menjadi sinyal kuat bahwa eskalasi kekerasan adalah fenomena nyata yang memerlukan respons kebijakan yang cepat dan tepat. Naskah kebijakan ini bertujuan untuk menganalisis data kualitatif dan kuantitatif secara mendalam guna merumuskan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) di Kota Bogor.

Untuk itu, langkah pertama adalah memetakan lanskap permasalahan secara presisi, mengidentifikasi di mana, kapan, dan kepada siapa kekerasan ini paling sering terjadi.



## 2. Analisis Situasi

# Peta Permasalahan Kekerasan di Satuan Pendidikan Kota Bogor



Untuk merumuskan kebijakan yang efektif, pemahaman mendalam mengenai lanskap permasalahan adalah langkah fundamental. Analisis data kuantitatif dan kualitatif yang disajikan pada bagian ini memberikan gambaran utuh mengenai skala, jenis, profil korban dan pelaku, serta konteks spesifik terjadinya kekerasan di satuan pendidikan Kota Bogor. Pemetaan ini menjadi fondasi utama dalam merancang intervensi yang tepat sasaran dan berdampak.

### 2.1. Lanskap dan Skala Masalah Kekerasan

Data agregat dari berbagai sumber—termasuk pemantauan lapangan, laporan KPAID, UPTD PPA, dan pemberitaan media—mengungkapkan skala masalah yang signifikan. Dari total 348 insiden yang terhimpun, dua bentuk kekerasan menempati posisi tertinggi, yaitu perundungan (bullying) dengan 137 kasus dan kekerasan fisik dengan 134 kasus. Dominasi kedua kategori ini menunjukkan bahwa intimidasi dan agresi fisik telah menjadi fenomena yang mengakar di interaksi sosial siswa. Di samping itu, spektrum kekerasan yang terjadi sangat luas, mencakup kekerasan verbal (21 kasus) dan kekerasan seksual (20 kasus). Perlu dicatat bahwa tingginya angka kekerasan fisik sebagian besar didorong oleh peliputan media (112 dari 134 kasus), yang mengindikasikan bahwa insiden fisik yang eskalatif lebih mungkin menjadi sorotan publik, sementara bentuk kekerasan lain seperti perundungan mungkin lebih meresap namun kurang terberitakan.



## 2.2. Profil Korban dan Pelaku: Siapa yang Paling Terdampak?

Analisis profil menunjukkan bahwa kekerasan terjadi di semua jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi, menandakan bahwa tidak ada level pendidikan yang imun terhadap masalah ini. Data pemantauan lapangan dan UPTD PPA secara konsisten menyoroti kerentanan spesifik pada kelompok tertentu. Sejalan dengan pernyataan KPAID bahwa **"Perempuan dan Anak paling rentan terimbas Kasus Kekerasan,"** data menunjukkan bahwa korban perempuan tercatat di berbagai tingkat usia krusial, yaitu 11 tahun (SD), 14 dan 15 tahun (SMP), 16 tahun (SMA), hingga 20 tahun (Perguruan Tinggi). Pola ini menunjukkan bahwa kerentanan berbasis gender bukanlah isu yang terbatas pada satu fase perkembangan, melainkan tantangan persisten yang berevolusi di sepanjang jenjang pendidikan, menuntut strategi perlindungan yang adaptif dan berkelanjutan.

## 2.3. Konteks Waktu dan Lokasi Kejadian

Identifikasi titik rawan terjadinya kekerasan menjadi kunci untuk merancang strategi pencegahan yang proaktif. Data gabungan dari laporan UPTD PPA dan hasil pemantauan lapangan secara jelas menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di dalam ruang kelas. Tiga periode waktu teridentifikasi sebagai yang paling kritis: **"Saat Istirahat," "Pulang Sekolah," dan "Di Perjalanan."** Momen-momen ini sering kali merupakan area dengan pengawasan yang lebih longgar, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Temuan ini secara langsung menantang paradigma bahwa keamanan sekolah hanya terbatas di dalam ruang kelas, dan menegaskan urgensi untuk meredesain strategi pengawasan pada waktu dan area non-terstruktur.

Setelah memahami skala dan konteks permasalahan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi sejauh mana kerangka kerja yang ada saat ini mampu merespons tantangan tersebut.

### 3. Evaluasi Kerangka Kerja PPKSP di Kota Bogor: Kebijakan vs. Realitas

Secara formal, Kota Bogor telah memiliki fondasi kebijakan dan kelembagaan yang kuat untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). Kerangka kerja ini dirancang untuk menjadi sistem yang responsif dan protektif. Bagian ini akan mengevaluasi efektivitas kerangka tersebut, mulai dari dasar hukum yang melandasi hingga mekanisme yang berjalan di lapangan, untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan yang ideal dengan realitas implementasinya.

#### 3.1. Fondasi Kebijakan dan Kelembagaan

Landasan hukum untuk program PPKSP di Kota Bogor bersifat multi-lapis dan komprehensif, mencakup peraturan di tingkat nasional hingga daerah. Fondasi ini memberikan legitimasi dan arah yang jelas bagi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.

- **UU No. 12 Tahun 2022** tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
- **Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023** tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).
- **Perda Kota Bogor No. 10 Tahun 2021** tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.

Secara kelembagaan, infrastruktur di tingkat satuan pendidikan telah dibentuk secara masif. Tercatat sebanyak **9.884 anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)** telah tersebar di 1.007 satuan pendidikan, yang berarti mencakup 97,72% dari total sekolah di Kota Bogor. Keberadaan TPPK ini didukung oleh **Satuan Tugas (Satgas) PPKSP tingkat Kota Bogor** yang berfungsi sebagai koordinator dan eskalasi penanganan.



### 3.2. Mekanisme Pelaporan dan Penanganan yang Tersedia

Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kekerasan di sekolah telah dirancang dengan alur yang sistematis dan berorientasi pada perlindungan korban. Alur ini mencakup empat tahapan utama:

1. **Pencegahan:** Melalui edukasi, sosialisasi, dan pembentukan TPPK.
2. **Pelaporan:** Korban atau saksi dapat melapor ke TPPK atau guru Bimbingan Konseling (BK).
3. **Pemeriksaan:** TPPK melakukan pengumpulan fakta secara hati-hati dengan memisahkan pemeriksaan korban, pelaku, dan saksi.
4. **Penyelesaian dan Tindak Lanjut:** Meliputi pemulihan psikologis bagi korban, pemberian sanksi administratif bagi pelaku, dan koordinasi dengan pihak terkait.

Selain mekanisme internal sekolah, tersedia pula berbagai saluran pelaporan eksternal yang dapat diakses oleh korban, seperti Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA 129), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hingga Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian.

Meskipun kerangka kerja di atas kertas terlihat komprehensif dan ideal, implementasinya dihadapkan pada berbagai kendala signifikan yang menghambat efektivitasnya dalam melindungi warga sekolah.





## 4 Identifikasi Kendala Kunci dan Akar Masalah

Bagian ini merupakan inti dari analisis kebijakan, di mana akan diuraikan secara mendalam berbagai kendala—baik yang berasal dari internal satuan pendidikan maupun faktor eksternal—serta akar masalah yang menyebabkan program PPKSP belum berjalan optimal. Temuan ini disarikan dari data wawancara, observasi lapangan, dan analisis kesenjangan data pelaporan.

### 4.1. Kendala Internal Satuan Pendidikan

Meskipun TPPK telah terbentuk di hampir seluruh sekolah, efektivitasnya terhambat oleh berbagai persoalan internal yang sistemik. Kendala-kendala ini dapat dikelompokkan menjadi tiga tema utama:

1. Keterbatasan Kapasitas: Banyak sekolah mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi. Anggota TPPK dan tenaga pendidik sering kali belum memiliki pelatihan yang memadai untuk menangani kasus kekerasan yang kompleks. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk kekerasan non-fisik, seperti kekerasan verbal dan psikologis.
2. Budaya Institusional: Penghalang terbesar terungkapnya kasus adalah adanya "Budaya Diam" (Culture of Silence). Korban dan saksi enggan melapor karena takut akan stigma, ancaman balas dendam, atau tekanan untuk menjaga "nama baik sekolah". Budaya ini diperkuat oleh adanya resistensi dari sebagian guru dan diperparah oleh pandangan dari pemangku kepentingan di tingkat dinas (Disdik dan KCD) yang, berdasarkan wawancara, menyatakan bahwa "kasus masih bisa diselesaikan secara internal," yang secara tidak langsung melegitimasi penanganan kasus di luar jalur formal.
3. Kelemahan Sistemik: Terjadi koordinasi yang lemah antara sekolah dengan lembaga layanan eksternal seperti dinas sosial, kepolisian, atau psikolog profesional. Selain itu, sekolah juga belum memiliki mekanisme deteksi dini yang optimal untuk mengidentifikasi siswa dengan potensi perilaku menyimpang sebelum kekerasan terjadi.



## 4.2. Tantangan Eksternal dan Faktor Pemicu

Satuan pendidikan tidak beroperasi di ruang hampa. Faktor-faktor eksternal turut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya perilaku kekerasan. Dukungan orang tua yang minim menjadi tantangan besar; sebagian cenderung menolak proses hukum atau justru mewariskan pola asuh yang permisif terhadap kekerasan. Di sisi lain, pengaruh media sosial yang negatif menjadi stimulan bagi siswa untuk meniru perilaku agresif. Faktor pemicu lainnya berakar dari lingkungan terdekat siswa, seperti kebiasaan berkata kasar dari rumah dan ketimpangan sosial-ekonomi yang dapat memicu frustrasi dan gangguan emosional.

## 4.3. Analisis Kesenjangan Pelaporan:

### Angka Formal vs. Fenomena Gunung Es

Salah satu temuan paling krusial adalah kesenjangan data pelaporan yang sangat ekstrem. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus yang dilaporkan secara resmi ke sekolah hanya 2 kasus. Angka ini sangat kontras dengan temuan dari sumber lain: 31 kasus teridentifikasi melalui observasi dan wawancara (tidak dilaporkan), 54 kasus ditangani oleh KPAID, dan 224 kasus diberitakan oleh media. Disparitas ini adalah bukti nyata adanya fenomena gunung es, di mana kasus yang muncul di permukaan hanyalah sebagian kecil dari masalah yang sebenarnya. Temuan kualitatif dari UPTD PPA yang menyatakan bahwa banyak korban "memilih berdamai" atau "diam agar tidak malu kasusnya diketahui orang banyak" secara langsung mengonfirmasi keberadaan "Budaya Diam" yang telah melumpuhkan efektivitas mekanisme pelaporan formal di sekolah. Berdasarkan identifikasi serangkaian kendala krusial tersebut, selanjutnya dirumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat solutif dan dapat ditindaklanjuti untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan realitas.

## 5. Rekomendasi Kebijakan Strategis

Rekomendasi kebijakan berikut ini dirancang secara spesifik untuk mengatasi akar masalah dan kendala implementasi yang telah diidentifikasi pada analisis sebelumnya. Rekomendasi ini bersifat praktis, terukur, dan berfokus pada penguatan sistem PPKSP secara holistik, mulai dari peningkatan kapasitas individu hingga perbaikan ekosistem di tingkat kota.

### Rekomendasi 1

#### Penguatan Kapasitas TPPK dan Tenaga Pendidik

Untuk menjawab kendala "Keterbatasan SDM dan Kompetensi," Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan perlu menyelenggarakan program pelatihan teknis yang berkelanjutan dan tersertifikasi bagi seluruh anggota TPPK dan guru BK. Materi pelatihan harus mencakup keterampilan praktis seperti teknik investigasi kasus yang berperspektif korban, metode mediasi konflik yang konstruktif, serta pemberian pertolongan pertama psikologis (psychological first aid).

### Rekomendasi 2

#### Membangun Ekosistem Sekolah yang Aman dan Terbuka

Untuk membongkar "Budaya Diam," setiap satuan pendidikan didorong untuk mengimplementasikan kampanye "Berani Laporkan Itu Hebat" secara masif. Kampanye ini harus diintegrasikan ke dalam kegiatan kurikuler seperti Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Hal terpenting adalah menyusun dan mensosialisasikan SOP pelaporan yang secara eksplisit menjamin kerahasiaan identitas dan keamanan pelapor dari segala bentuk intimidasi. Jaminan ini harus dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh siswa dan orang tua agar terbangun kepercayaan terhadap sistem.



**Rekomendasi 3****Penguatan Kolaborasi Lintas  
Sektoral dan Keterlibatan Orang Tua**



Mengatasi "Koordinasi Lemah" dan minimnya "Dukungan Orang Tua" memerlukan intervensi sistemik. Direkomendasikan pembentukan Forum Komunikasi PPKSP Kota Bogor yang mengadakan pertemuan rutin melibatkan Satgas PPKSP Kota, perwakilan TPPK, UPTD PPA, KPAID, dan Unit PPA Kepolisian. Mandat utama forum ini adalah untuk mengembangkan dan mengesahkan Protokol Rujukan Lintas Sektoral yang terpadu, memastikan alur penanganan kasus yang jelas, cepat, dan tidak tumpang tindih. Secara paralel, dirancang program edukasi wajib bagi orang tua/wali murid baru mengenai pola asuh positif dan dampak psikologis kekerasan pada anak.

**Rekomendasi 4****Optimalisasi Mekanisme Deteksi  
Dini dan Intervensi Berbasis Data**

Untuk mengatasi "Kurangnya Deteksi Dini," setiap satuan pendidikan diwajibkan untuk mengembangkan 'Peta Pengawasan Kerawanan' (Vulnerability Supervision Map) berdasarkan data waktu dan lokasi. Peta ini harus menjadi dasar alokasi jadwal piket guru secara dinamis dan efektif, terutama dengan meningkatkan kehadiran pengawas di area-area non-kelas yang teridentifikasi rawan (seperti kantin, halaman belakang, dan gerbang sekolah) pada jam-jam kritis seperti saat istirahat dan pulang sekolah.



## 6. Penutup



Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan Kota Bogor adalah masalah nyata dengan tren peningkatan kasus yang mengkhawatirkan dan tidak dapat diabaikan. Analisis menunjukkan bahwa meskipun fondasi kebijakan telah terbangun, keberhasilannya bergantung pada komitmen kolektif untuk mengatasi kendala implementasi di lapangan. Kesenjangan antara angka laporan formal yang minim dengan realitas kasus yang jauh lebih tinggi menegaskan adanya "Budaya Diam" yang harus segera dibongkar melalui penguatan sistem yang berpihak pada korban. Keberhasilan program PPKSP bukanlah sekadar tentang membentuk tim, melainkan tentang membangun ekosistem kepercayaan di mana setiap individu merasa aman untuk belajar dan bersuara. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan—pemerintah daerah, dinas terkait, kepala sekolah, guru, orang tua, hingga siswa—diajak untuk berkolaborasi secara serius dalam mengimplementasikan rekomendasi yang telah diusulkan. Hanya dengan kerja bersama, kita dapat mewujudkan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan bagi seluruh anak di Kota Bogor.

Optimalisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di  
Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) Kota Bogor